RENCANA KERJA
TAHUN 2022

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BANTEN

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI BANTEN
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang
website : www.dp3akkb.bantenprov.go.id

BAB 1

PENDAHULUAN

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat RENJA adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan RENSTRA) ke dalam rencana program kegiatan dan penganggaran tahunan. RENJA menjembatani Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD), yang ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah.

Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan dan komitmen Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten menyusun Rancangan RENJA Tahun 2019 sebagai wujud pelaksanaan tahun kedua dari Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022 yang telah diintegrasikan dengan prioritas Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rancangan RENJA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten Tahun 2021 mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu Rancangan RENJA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten Tahun 2021 berfungsi menjabarkan rencana strategis dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan dan program kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016);

13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 83);
14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Dan Pengawas Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 38).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Penyusunan Rancangan RENJA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten Tahun 2019 adalah untuk mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program – program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten dengan harapan dapat meningkatkan peran seluruh pemangku kepentingan dan stakeholder untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rancangan RENJA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten tahun 2021 adalah :

1. Mendeskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten;
2. Sebagai acuan dalam pelaksanaaan tugas pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten

BAB 2

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2020

BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2020

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2020 DAN CAPAIAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2020

Seiring dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, maka fungsi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang semula menjadi bagian dari Dinas pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten serta fungsi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang semula menjadi bagian pada Biro Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Banten, mengalami *reorganiasasi* dan digabungkan kedalam perangkat daerah berbentuk dinas. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah.

Merujuk kepada Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten, maka fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

1. Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Daerah provinsi;
2. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi;
3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah provinsi;
4. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;
5. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;

6. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah provinsi;
7. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;
8. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah kabupaten/kota;
9. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah kabupaten/kota;
10. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah provinsi;
11. Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah provinsi;
12. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;
13. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;
14. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah provinsi;
15. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;
16. Penyusunan profile kependudukan provinsi;
17. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah provinsi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
18. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah provinsi;
19. Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal;
20. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan berKB;
21. Pengelolaan pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
22. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
23. Pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan administrasi kependudukan;

24. Penyelenggaraan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
25. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
26. Penyajian data kependudukan berskala provinsi berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;
27. Pengoordinasian pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan;
28. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap RENJA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten Tahun 2020 serta RENJA Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan program & kegiatan, dan hasil pelaksanaan program & kegiatan.

Penyusunan Rancangan RENJA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten Tahun 2021, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dikehendaki;
c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Penyusunan Rancangan RENJA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten Tahun 2020 juga memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan, masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN

Penyelenggaraan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan bagian dari proses pembangunan nasional dalam rangka mencapai cita-cita bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mandiri, maju, adil dan makmur.

Penyelenggaraan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Merujuk kepada Renstra Dinas pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten periode tahun 2017-2022, strategi yang diterapkan dalam meningkatkan kinerja pelayanan di bidang perempuan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilaksanakan melalui strategi Pemerintah Daerah dalam RPJMD Tahun 2017-2022, meliputi :

1. Peningkatan Administrasi Kependudukan melalui Optimalisasi Sistem Informasi Kependudukan;
2. Peningkatan peran perempuan yang dapat meningkatkan partisipasi pendidikan, kualitas kesehatan serta peningkatan perekonomian keluarga;
3. Penurunan angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; dan
4. Peningkatan Kerjasama dengan Kabupaten Kota untuk pengendalian pertumbuhan penduduk; dan

Capaian kinerja pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten merujuk kepada pelaksanaan tahun terakhir RENSTRA Dinas pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten dan RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Banten tahun 2017 - 2022 melalui :

1. Program Tata Kelola Pemerintahan
2. Program Pemberdayaan Perempuan
3. Program Perlindungan Perempuan dan Anak
4. Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
5. Program Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Berdasarkan pengukuran capaian indikator kinerja program kegiatan sebagai berikut:

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	%	100.0	100.0	100.0
		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	%	100.0	100.0	100.0
		Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100.0	100.0	100.0
		Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	%	100.0	100.0	100.0

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pemberdayaan Perempuan	Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen	%	15.29	17.65	115.43
		Persentase Peningkatan Kontribusi Perempuan Di Bidang Ekonomi	%	32.13	31.29	97.38
		Persentase Peningkatan Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Perempuan	%	16.67	92.98	557.76
		Persentase Peningkatan Lembaga Pemerintah Tingkat Daerah Provinsi Yang Responsif Gender	%	82.22	100.00	121.62

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	**2**	**3**	**4**	**5**		
1	Program Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan	%	100.0	100.00	100.00
		Persentase Pengembangan Kab/Kota menuju KLA Kategori Nindya	%	25.0	12.50	50.00
		Persentase Peningkatan Sinergitas Program dan Kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak	%	25.0	77.42	309.68

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	**2**	**3**	**4**	**5**		
1	Program Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Persentase Fasilitasi Dalam Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP-el di Kab/Kota	%	75.0	100.00	133.33
		Persentase Fasilitasi Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 - 18 Tahun	%	87.5	100.00	114.28
		Persentase Pengelolaan Administrasi Kependudukan Berbasis SIAK versi ter-update	%	100.0	100.00	100
		Persentase Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Oleh SKPD Provinsi	%	50.0	16.13	32.26

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Persentase perangkat daerah Provinsi yang memanfaatkan Dokumen kebijakan kependudukan	%	100.0	100.0	100.0
		Peningkatan Persentase Kelompok Kegiatan Yang Melaksanakan 8 Fungsi Keluarga	%	4.03	4.99	123.82
		Persentase peserta KB Aktif	%	0.02	0.01	50.0

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BANTEN

Dalam penetapan arah pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana, perlu memperhatikan dinamika yang terjadi pada tataran regional, nasional maupun internasional meliputi :

A. Isu Internasional
   1. Ratifikasi Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak PRT dan Optional Protocol - CEDAW dimana individu yang sudah tertutup akses keadilan di Indonesia dapat melapor ke PBB

B. Isu Nasional
   1. Menghapus kekerasan seksual dengan memperkuat legislasi dan menghukum seluruh tindak kejahatan seksual pada perempuan dan anak perempuan. Indonesia harus meneruskan upaya menghentikan impunitas, mengurangi kekerasan terhadap perempuan khususnya kekerasan seksual, pelecehan seksual termasuk di tempat kerja
   2. Menghapus praktek menyakitkan seperti sirkumsisi perempuan, pernikahan anak dan pemaksaan perkawinan kepada anak, serta menaikan usia pernikahan menjadi 18 tahun
   3. Memastikan implementasi UU PKDRT untuk melindungi perempuan dan kelompok rentan, pemberdayaan perempuan korban dan memutus impunitas pelaku kekerasan terhadap perempuan
   4. Perlindungan pekerja migran dengan instrumen hukum yang mengikat, melindungi pekerja migran dari tindak trafiking, mengefektifkan satgas anti traficking sampai ke berbagai wilayah di Indonesia
   5. Hak atas kesehatan reproduksi dan seksual terdiri melalui akses pendidikan reproduksi dan seksual, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, akses layanan kontrasepsi bagi yang menikah maupun yang tidak menikah, kehamilan usia anak, memerangi HIV-AIDS, meningkatkan kesehatan ibu dan anak
   6. Perlindungan perempuan melalui instrumen hukum dan perundang-undangan sesuai dengan konvensi CEDAW dan membahas RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender
   7. Penghapusan kebijakan diskriminatif yang menyasar perempuan dan kelompok minoritas dengan cara mereview dan membatalkan kebijakan yang menghalangi hak-hak yang dijamin oleh konstitusi baik hak perempuan, hak kelompok minoritas agama/kepercayaan, etnis, dan minoritas seksual
   8. Pendidikan gender dan HAM perempuan bagi polisi dan aparat penegak hukum
   9. Meningkatkan representasi perempuan di politik dan pengambil keputusan di pemerintahan
   10. Memperkuat posisi Komnas Perempuan sebagai lembaga HAM Nasional

11. Pengembangan kapasitas kebijakan pengendalian penduduk dan KB di daerah
12. Pengembangan kapasitas kelembagaan di pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten /Kota

C. Isu Regional

1. Sarana prasarana terkait program perlindungan perempuan dan anak belum optimal
2. Penguatan Gugus Tugas TPPO
3. Pemberdayaan Perempuan Lansia
4. Pemberdayaan Perempuan Disabilitas
5. Pemberdayaan Perempuan Korban Bencana
6. Penguatan Strategi PUG melalui PPRG pada setiap OPD
7. Penguatan P2TP2A
8. Penguatan POKJA PUG, Sekber PPRG dan Focal point
9. Penguatan sistem data gender dan anak
10. Penguatan Kelembagaan Masyarakat, Dunia Usaha, Media dalam mendukung Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11. Optimalisasi pembinaan KLA ke Kabupaten / Kota
12. Ruang Publik Terbuka Ramah Anak
13. Peningkatan Partisipasi Anak dalam Pembangunan
14. Sinergitas lintas sektor dalam perlindungan khusus anak
15. Peningkatan Kelembagaan Forum Anak
16. Peningkatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17. Kurangnya komitmen dan dukungan stakeholders terhadap program KKBPK, yaitu terkait kelembagaan, kebijakan, perencanaan program dan penganggaran
18. Kurangnya pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga
19. Belum optimalnya Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

Berdasarkan isu-isu strategis tersebut, maka prioritas di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana difokuskan kepada :

1. Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan perempuan;
2. Perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan;
3. Peningkatan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi mengenai KB;
4. Peningkatan kepemilikan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Fokus prioritas pembangunan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana dihadapkan pada tantangan dan hambatan serta peluang dan kekuatan, meliputi :

a. Tantangan
   1. Pengarusutamaan gender yang diikuti dengan penyempurnaan dan perubahan peraturan perundang-undangan yang tidak bias gender dan tidak mendiskriminasikan kaum perempuan.;
   2. Membangun strategi perlindungan perempuan dan anak yang meminimalkan konflik peran;
   3. Menghindarkan pengaruh buruk terhadap anak dan remaja dari berbagai faktor yang merusak masa kecilnya, baik secara fisik maupun psikis;
   4. Menciptakan lingkungan, sarana prasarana, serta pendampingan yang kondusif dan nyaman bagi anak dan remaja;
   5. Meningkatkan kesertaan PUS untuk berkeluarga berencana;
   6. Meningkatnya kemandirian ekonomi untuk bagai masyarakat yang ber-KB;
   7. Meningkatkan tertib nomor induk kependudukan, tertib *data base* kependudukan, dan tertib dokumen kependudukan

b. Hambatan
   1. Sinergis, sistematis, struktur, dan konsisten penyelenggaraan program lintas sektor belum optimal;
   2. Terbatasnya sarana prasarana pendukung pelayanan perlindungan perempuan dan anak;
   3. Rendahnya kesadaran dan akses masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
   4. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan program Keluarga Berencana.

c. Peluang
   1. Potensi SDM perempuan dalam pembangunan;
   2. Menyediakan advokasi, fasilitasi dan mediasi perlindungan perempuan dan anak untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan anak;
   3. Pemantapan, peningkatan peran dan kemandirian organisasi perempuan;
   4. Meningkatkan peranan perempuan sebagai pengambil keputusan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
   5. Berkembangnya pembangunan di sektor ekonomi menjadi peluang pemberdayaan ekonomi bagi perempuan;
   6. Tingginya partisipasi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Kader dalam Keluarga Berencana;

7. Tersedianya advokasi, fasilitasi, koordinasi dan KIE program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta kesehatan reproduksi;

d. Kekuatan

1. Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mendukung penyelenggaran pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

Dari hasil analisis terhadap isu-isu dalam pembangunan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana, selanjutnya dikelompokan ke dalam isu strategis sebagai berikut:

1. Peran perempuan dalam pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas hidup;
2. Kualitas Perlindungan Perempuan dan anak
3. Pelaksanaan AKIE (Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi) mengenai KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembagunan Keluarga)
4. Kepemilikan dokumen kependudukan
5. Tata Kelola Pemerintahan

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2020

Dalam menyusun rencana pembangunan tahunan berpijak pada kebijakan pemerintah provinsi secara umum yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yang teknis operasional perencanaan tahunan dituangkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021 merupakan upaya sinkronisasi perencanaan pembangunan yang diselaraskan antara perencanaan program kegiatan secara umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten dengan perencanaan program kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten tahun 2021.

Tema rancangan awal RKPD Tahun 2021 dijabarkan ke dalam 10 (sepuluh) prioritas pembangunan tahun 2018 meliputi :

1. Pembangunan Aksesibilitas, Mutu Dan Relevansi Pendidikan dengan fokus pembangunan diarahkan kepada :
   a. Meningkatkan pemenuhan hak dasar masayarakat dalam Layanan pendidikan Menengah (Infrastruktur, bantuan Biaya Pendidkan, Peningkatan Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, rekrutmen)
   b. Pendidikan berkebutuhan khusus

c. Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan menengah

2. Pembangunan Meningkatkan Aksesibilitas Dan Kualitas Layanan Kesehatan dengan fokus pembangunan diarahkan kepada :
   a. Meningkatkan pemenuhan hak dasar masayarakat dalam Layanan kesehatan (Infrastruktur, bantuan Biaya kesehatan dan tenaga Medis dan paramedis)
   b. Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat
   c. Penguatan Upaya Promotif dan Preventif
   d. Perbaikan Gizi Masyarakat dan Kesehatan Ibu dan Anak
3. Pembangunan Infrastruktur Wilayah, Energi Dan Air Baku dengan fokus pembangunan diarahkan kepada :
   a. Penanganan Perhubungan Darat dan pelayaran
   b. Infrastruktur jalan dan dan jembatan
   c. Infrastruktur daerah irigasi permukiman dan perumahan;
   d. Pemenuhan kecukupan air baku dan pengembangan infrastruktur air bersih perkotaan dan perdesaan
   e. Perkuatan Infrastuktur Desa Miskin dan Tertinggal
   f. Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten
   g. Pemenuhan elektrifikasi
   h. Pengendalian Bidang Pertambangan
4. Pembangunan Ekonomi Lokal dengan fokus pembangunan diarahkan kepada :
   a. Perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha
   b. Peningkatan Akses pembiayaan dan akses pasar
   c. Pengembangan Ekonomi kreatif dan Koperasi
   d. Meningkatkan dukungan infrastruktur Produksi dan Distribusi barang dan Jasa dan Promosi
5. Pembangunan Pertanian dengan fokus pembangunan diarahkan kepada :
   a. Intensifikasi pertanian melalui pengembangan bibit unggul (pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan)
   b. Meningkatkan dukungan Prasarana dan Sarana disentra produksi pangan
   c. Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain
   d. Peningkatan Nilai Tambah Produk Pangan dan Pangan Lainnya
   e. Meningkatkan Kelancaran Distribusi Pangan dan Akses Pangan Masyarakat
   f. meningkatkan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat
   g. Penanganan Gangguan Terhadap Produksi Pangan
   h. Penguatan Kelembagaan Petani
6. Pelestarian Seni, Budaya Dan Pembangunan Kepemudaan Dan Pariwisata dengan fokus pembangunan diarahkan kepada :

a. Pengembangan fasilitas olahraga dan kepemudaan
b. Pelestarian kebudayaan
c. Promosi dan Pengembangan Destinasi wisata
d. Pengembangan kompetensi SDM dan Kelembagaan pariwisata

7. Pembangunan Ketahanan Keluarga Dan Kependudukan dengan fokus pembangunan diarahkan kepada :
   a. Pengendalian Penduduk melalui program keluarga berencana
   b. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga
8. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dengan fokus pembangunan diarahkan kepada :
   a. Peningkatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial terhadap PMKS;
   b. Pengurangan Beban Penduduk Miskin
9. Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Kebencanaan dengan fokus pembangunan diarahkan kepada :
   a. Konservasi dan rehabilitasi kawasan lindung dan hutan rakyat
   b. Pengendalian pencemaran limbah industry, limbah domestic dan pengelolaan sampah regional
   c. Penanganan bencana longsor dan banjir
10. Meningkatkan Kinerja Aparatur Serta Tata Kelola Pemerintahan Dengan Penerapan Iptek dengan fokus pembangunan diarahkan kepada :
    a. Peningkatan profesionalisme aparatur
    b. Penelitian dan implementasi hasil penelitian
    c. Kerjasama pendanaan dan program pembangunan
    d. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan aset dan keuangan;
    e. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
    f. Penerapan E-Government
    g. Pelaksanaan Roadmap Reformasi Birokrasi

Sebagai pengejawantahan Tema RKPD Provinsi Banten tahun 2021, maka ditetapkan pula tema Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten tahun 2021, yang difokuskan kepada :

1. Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak;
2. Peningkatan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi mengenai Keluarga Berencana

Proritas pembangunan tahun 2021 selanjutnya diimplementasikan secara nyata melalui program prioritas meliputi :

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
5. Program Perlindungan Perempuan
6. Program Pemenuhan Hak Anak
7. Program Perlindungan Khusus Anak
8. Program Pendaftaran Penduduk
9. Program Pencatatan Sipil
10. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
11. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
12. Program Pengendalian Penduduk
13. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
14. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Keterkaitan antara prioritas pembangunan tahun 2021 dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2017-2022 sebagaimana tabel 2.1 terlampir.

Tabel 2.1
Keterkaitan antara prioritas pembangunan tahun 2021 dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2017-2022

Secara umum substansi sasaran program kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten Banten Tahun 2021 telah mempedomani kepada pencapaian sasaran dalam RKPD Provinsi Banten Tahun 2021, sebagaimana terlampir pada Tabel 2.1 terlampir

Tabel 2.2
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Tercapainya Penyelenggaraan Dinas P3AKKB Provinsi Banten yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Nilai	80.0	80.0	100%
2	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	71.14	72.75	102.26
3	Meningkatnya Kualitas Administrasi Kependudukan dan Profil Penduduk	Cakupan Database Kependudukan Tingkat Provinsi	%	100.00	100.00	100.00
4	Meningkatnya Perlindungan anak dan perempuan	Pemenuhan Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak	%	72.73	73.33	100.82
5	Meningkatnya pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Total (TFR)	%	2.21	2.73	80.95

1.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN

Dalam menyusun rencana program kegiatan dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan tidak terlepas dari peran serta pemangku kepentingan yang terkait dan diformulasikan kedalam usulan program kegiatan. Proses yang dilakukan melalui penyampaian usulan program kegiatan melalui mekanisme komunikasi dan ditindaklanjuti melalui verifikasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten.

Dari usulan program kegiatan yang disampaikan oleh para pemangku kepentingan, terdapat program kegiatan yang telah diakomodir ke dalam program kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten. Namun demikian terdapat usulan program kegiatan yang perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme Bantuan Keuangan dan Hibah.

PEMETAAN RENSTA OPD TERHADAP KEPMENDAGRI NOMOR 050-7308 TAHUN 2020 TENTANG HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMUTAHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENK

OPD : DP3AKKB PROVINSI BANTEN

Pergub Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Perubahan Renstra Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2017-2022																								Pemetaan Kepm						
Urusan	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran OPD	Target Indikator Kinerja Sasaran OPD				Program	Indikator Program	Target Indikator Program						Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Indikator Kinerja Sub Kegiatan						Sub Kegiatan	Target Indikator Kinerja Sub Kegiatan						Kegiatan
						2021		2022				2021			2022					2021			2022				2021			2022			
						Target	Satuan	Target	Satuan			Target	Satuan	Rp.	Target	Satuan	Rp.			Target	Satuan	Rp.	Target	Satuan	Rp.		Target	Satuan	Rp.	Target	Satuan	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH	MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)	Terwujudnya kelembagaan DP3AKKB yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta	Meningkatnya Penyelenggaraan DP3AKKB yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	85	Nilai	85	Nilai	Program Tata Kelola Pemerintahan	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	100	%	550,000,000	100	%	750,000,000	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Penyusunan Laporan Evaluasi Program Kegiatan	3	dokumen	50,000,000	3	dokumen	50,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Dokumen	24,600,000	3	Dokumen	24,600,000	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
																			Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan	11	dokumen	200,000,000	11	dokumen	200,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	Dokumen	374,817,500	10	Dokumen	475,817,500	
																			Penyusunan Renstra				2	dokumen	200,000,000								
																			Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	7	dokumen	200,000,000	7	dokumen	200,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	11,967,500	1	Dokumen	11,967,500	
																										Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	14,002,500	1	Dokumen	14,002,500	
																										Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	Dokumen	5,230,000	1	Dokumen	5,230,000	
																										Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	7,265,000	1	Dokumen	7,265,000	
																			Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian	12	dokumen	100,000,000	12	dokumen	100,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Dokumen	61,117,500	4	Dokumen	61,117,500	
											Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	100	%	5,010,944,400	100	%	6,810,944,400	Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	6	Kegiatan	3,740,944,400	6	Kegiatan	2,940,944,400	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1	Kegiatan	11,666,600	1	Kegiatan	11,666,500	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**
																										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Kegiatan	203,220,500	1	Kegiatan	203,220,500	
																										Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	Kegiatan	43,094,123	1	Kegiatan	50,000,000	
																										Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	Kegiatan	159,257,000	1	Kegiatan	159,257,000	
																										Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1	Kegiatan	173,073,527	1	Kegiatan	174,000,000	
																										Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan				1	Kegiatan	10,000,000	
																										Penyediaan Bahan/ Material				1	Kegiatan	10,000,000	
																										Fasilitasi Kunjungan Tamu				1	Kegiatan	10,000,000	
																			Rapat Koordinasi ke dalam dan keluar daerah	2	Kegiatan	300,000,000	2	Kegiatan	350,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Kegiatan	178,194,000	1	Kegiatan	300,000,000	
																										Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1	Kegiatan	10,000,000	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
																										Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Kegiatan	75,350,000	1	Kegiatan	1,350,000,000	
																										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Kegiatan	930,954,000	1	Kegiatan	930,954,000	
																			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1	Kegiatan	500,000,000	1	Kegiatan	3,000,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1	Kegiatan	601,882,000	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
																										Pengadaan Mebeler	1	Kegiatan	29,414,000	1	Kegiatan	1,450,000,000	
																										Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1	Kegiatan	182,000,000	
																										Pengadaan Aset Tetap Lainnya				1	Kegiatan	100,000,000	
																										Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1	Kegiatan	200,000,000	
																										Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan				1	Kegiatan	350,000,000	
																			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	3	Kegiatan	450,000,000	3	Kegiatan	500,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	1	Kegiatan	31,688,250	1	Kegiatan	35,000,000	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

																										Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	1	Kegiatan	349,140,000	1	Kegiatan	400,000,000	
																										Pemeliharaan mebeler				1	Kegiatan	20,000,000	
																										Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Kegiatan	48,609,000	1	Kegiatan	20,000,000	
																										Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				1	Kegiatan	50,000,000	
																										Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1	Kegiatan	150,000,000	
																										Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1	Kegiatan	50,000,000	
																										Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1	Kegiatan	50,000,000	
																		Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	Pengelolaan Kearsipan Dinamis	12	Bulan	15,000,000	12	Bulan	15,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1	Kegiatan	20,000,000	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**
																			Pengelolaan Perpustakaan Khusus	12	Bulan	5,000,000	12	Bulan	5,000,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1	Kegiatan	10,000,000	
											Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100	%	127,035,600	100	%	127,035,600	Peningkatan Kapasitas Aparatur	Fasilitasi Administrasi Kepegawaian	15	dokumen	7,035,600	15	dokumen	7,035,600	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1	Kegiatan		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
																			Peningkatan Kompetensi Aparatur	3	dokumen	120,000,000	3	dokumen	120,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1	Kegiatan	30,877,000	1	Kegiatan	10,000,000	
																										Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1	Kegiatan	90,000,000	
																										Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1	Kegiatan	10,000,000	
																										Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Kegiatan	462,000	1	Kegiatan	10,000,000	
																										Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				1	Kegiatan	10,000,000	
											Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran	100	%	50,000,000	100	%	50,000,000	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan	8	dokumen	14,131,000	8	dokumen	14,131,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	Bulan		14	Bulan		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
																										Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Bulan		12	Bulan		
																										Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	dokumen	2,732,000	1	dokumen	2,732,000	
																										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	dokumen	3,250,000	1	dokumen	3,250,000	
																										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	dokumen	58,500,000	3	dokumen	83,500,000	
																										Koordinasi dan Pelaksana Akuntansi SKPD	1	dokumen	1,500,000	1	dokumen	1,500,000	
																			Penyusunan Dok Laporan Pajak	3	dokumen	13,219,000	3	dokumen	13,219,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	dokumen	3,000,000	1	dokumen	3,000,000	
																			Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)	2	dokumen	22,650,000	2	dokumen	22,650,000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2	dokumen	6,018,000	2	dokumen	6,018,000	

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH	MENINGKATKAN AKSES DAN PEMERATAAN PELAYANAN PENDIDIKAN BERKUALITAS	Terwujudnya PUG dan Perlindungan Perempuan dan Anak Menuju Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlakul Karimah dan Berdaya Saing	Meningkatnya Pengarustamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71.94	Nilai	72.74	Nilai	Program Pemberdayaan Perempuan	Persentase Peningkatan Kontribusi Perempuan di Bidang Ekonomi	33.13	%	1,381,600,000	34.13	%	1,532,300,000	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Peningkatan Koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan PKHP Bagi SKPD se-Prov. Banten	2	Kegiatan	110,000,000	2	Kegiatan	110,000,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan				1	Kegiatan	60,000,000	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi**
																				Peningkatan Pengelolaan Industri Rumahan Perempuan	5	Kegiatan	1,271,600,000	5	Kegiatan	1,422,300,000	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan	3	Kegiatan	668,000,000	3	Kegiatan	1,412,300,000	
																										Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan				1	Kegiatan	60,000,000	
											Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen	16.47	%	90,000,000	17.64	%	90,000,000		Peningkatan Parsitisipasi Perempuan pada bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan provinsi	3	Kegiatan	90,000,000	3	Kegiatan	90,000,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan	3	Kegiatan	1,575,232,000	3	Kegiatan	50,000,000	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi**
																										Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	2	Kegiatan	46,196,000	2	Kegiatan	40,000,000	
											Persentase Peningkatan Lembaga Pemerintah Tingkat Daerah Provinsi Yang Responsif Gender	93.33	%	687,976,000	100	%	499,576,000	Perencanaan Responsif Gender	Pelatihan Penyusunan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)	2	Kegiatan	143,596,000	2	Kegiatan	143,596,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	2	Kegiatan	122,150,000	2	Kegiatan	143,596,000	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi**
																				Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tingkat Provinsi Banten dan	2	Kegiatan	163,750,000	2	Kegiatan	160,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	1	Kegiatan	105,022,000	1	Kegiatan	83,230,000	
																				Peningkatan Jejaring Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Tingkat Provinsi Banten	1	Kegiatan	260,630,000	1	Kegiatan	82,230,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	2	Kegiatan	45,150,000	2	Kegiatan	80,000,000	
																										Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan				1	Kegiatan	80,000,000	
																				Penyusunan data gender dan anak provinsi	2	Kegiatan	120,000,000	2	Kegiatan	113,750,000	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	1	Kegiatan	130,820,000	1	Kegiatan	62,750,000	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan**
																										Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	1	Kegiatan	159,870,000	1	Kegiatan	50,000,000	**Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi**
											Persentase Peningkatan Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Perempuan	20	%	1,284,284,000	23.33	%	1,321,984,000	Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga	Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan provinsi	3	Kegiatan	884,284,000	3	Kegiatan	921,984,000	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan	1	Kegiatan	36,500,000	1	Kegiatan	50,000,000	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**
																										Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi				1	Kegiatan	50,000,000	
																				Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Keluarga tingkat provinsi banten dan Kab Kota	3	Kegiatan	300,000,000	3	Kegiatan	300,000,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan	1	Kegiatan	139,825,000	1	Kegiatan	250,000,000	
																				Peningkatan kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas keluarga	3	Kegiatan	100,000,000	3	Kegiatan	100,000,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan				1	Kegiatan	50,000,000	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam**

																			Kualitas keluarga							Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	3	Kegiatan	2,081,000,000	2	Kegiatan	567,309,000	**dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**
																										Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	1	Kegiatan	154,675,000	1	Kegiatan	154,675,000	
																										Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah				1	Kegiatan	200,000,000	**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH	MENINGKATKAN AKSES DAN PEMERATAAN PELAYANAN PENDIDIKAN BERKUALITAS	Terwujudnya PUG dan Perlindungan Perempuan dan Anak Menuju Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlakul Karimah dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Pemenuhan Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak	77.27	%	100	%	Perlindungan Perempuan dan Anak	Prosentase Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan	100	%	1,561,110,000	100	%	1,561,110,000	Perlindungan Hak Perempuan	Peningkatan Koordinasi Tugas Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-P2TPPO)	3	Kegiatan	258,990,000	3	Kegiatan	258,990,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan	4	Kegiatan	519,808,500	3	Kegiatan	600,000,000	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**
																										Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan				1	Kegiatan	100,000,000	
																			Peningkatan peran lembaga/ organiasi kemasyarakatan / dunia usaha dan media dalam Perlindungan Perempuan	2	Kegiatan	979,840,000	2	Kegiatan	979,840,000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	1	Kegiatan	72,762,000	1	Kegiatan	100,000,000	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi**
																										Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan				1	Kegiatan	50,000,000	
																										Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan				1	Kegiatan	100,000,000	
																			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2	Kegiatan	184,820,000	2	Kegiatan	184,820,000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1	Kegiatan	89,750,000	1	Kegiatan	150,000,000	
																			Peningkatan Koordinasi Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan Tingkat Provinsi	2	Kegiatan	137,460,000	2	Kegiatan	137,460,000	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1	Kegiatan	353,240,000	1	Kegiatan	406,020,000	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**
																										Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	1	Kegiatan	55,090,000	1	Kegiatan	55,090,000	
											Prosentase Pengembangan Kab/Kota Menuju KLA Kategori Nindya	37.5	%	797,990,000	50	%	797,990,000	Perlindungan dan peningkatan tumbuh kembang anak	Peningkatan Koordinasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tingkat Provinsi Banten	5	Kegiatan	597,990,000	5	Kegiatan	597,990,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1	Kegiatan	141,450,000	1	Kegiatan	141,450,000	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan**
																			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	1	Kegiatan	50,000,000	1	Kegiatan	50,000,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan	4	Kegiatan	163,599,500	4	Kegiatan	400,000,000	

																			Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten /Kota	2	Kegiatan	150,000,000	2	Kegiatan	150,000,000	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten /Kota	2	Kegiatan	39,060,000	2	Kegiatan	56,540,000	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi**
																										Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				1	Kegiatan	50,000,000	
																										Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				1	Kegiatan	50,000,000	
																										Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				1	Kegiatan	100,000,000	
											Prosentase Peningkatan Sinergitas Program dan Kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak	37.5	%	600,000,000	37.5	%	600,000,000	Perlindungan khusus terhadap anak	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	2	Kegiatan	150,000,000	2	Kegiatan	150,000,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan	1	Kegiatan	20,400,000	1	Kegiatan	50,000,000	**Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**
																			Evaluasi Perlindungan Khusus Anak Tingkat Provinsi Banten	2	Kegiatan	100,000,000	2	Kegiatan	100,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	2	Kegiatan	54,280,000	2	Kegiatan	75,000,000	
																										Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				1	Kegiatan	100,000,000	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi**
																			Pengembangan KIE Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1	Kegiatan	73,406,000	1	Kegiatan	73,406,000	Pengembangan KIE Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1	Kegiatan	50,000,000	1	Kegiatan	50,000,000	
																			Peningkatan penyelenggaraan Perlindungan Anak	6	Kegiatan	276,594,000	6	Kegiatan	276,594,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan	1	Kegiatan	20,400,000	1	Kegiatan	50,000,000	
																										Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				1	Kegiatan	25,000,000	
																										Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				1	Kegiatan	50,000,000	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**
																										Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan				1	Kegiatan	100,000,000	

																													Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	3	Kegiatan	199,030,000	3	Kegiatan	100,000,000	
PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH	MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)	Terwujudnya kelembagaan DP3AKKB yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan	Meningkatnya Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel	Cakupan Database Kependudukan Tingkat Provinsi	100	%	100	%	Program Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Prosentase Fasilitasi Dalam Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP-El di Kab/Kota	87.5	%	565,626,000	100	%	565,626,000	Peningkatan Penyelenggaraan KTP-El dan KIA	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Provinsi Banten	1	Kegiatan	141,144,000	1	Kegiatan	141,144,000	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	2	Kegiatan	17,736,000	2	Kegiatan	27,666,000	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan**
																		Peningkatan Penyelenggaraan KTP-El dan KIA Kab/Kota	2	Kegiatan	274,482,000	2	Kegiatan	274,482,000									
																									Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	2	Kegiatan	36,430,000	2	Kegiatan	37,960,000	
																		Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	2	Kegiatan	150,000,000	2	Kegiatan	150,000,000	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	2	Kegiatan	138,614,000	2	Kegiatan	100,000,000	**Pelayanan Pendaftaran Kependudukan**
																									Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional				1	Kegiatan	30,000,000	
																	Penyelenggaraan Adminduk di Kabupaten/Kota (DAK)	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Adminduk Kabupaten/Kota	1	Kegiatan		1	Kegiatan		Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu				1	Kegiatan	30,000,000	
																		Rapat koordinasi Pelaksanaan Penerbitan KTP-el di Kabupaten/Kota	1	Kegiatan		1	Kegiatan		Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan				1	Kegiatan	30,000,000	
																									Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan,				1	Kegiatan	30,000,000	
																		Peningkatan Penyelenggaran adminduk Kabupaten/Kota	2	Kegiatan		2	Kegiatan		Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	2	Kegiatan	185,216,000	1	Kegiatan	130,000,000	**Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan**
																									Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk				1	Kegiatan	30,000,000	
																		Koordinasi dan Konsultasi Peyelenggaraan Pelayanan Adminduk	1	Kegiatan		1	Kegiatan		Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	2	Kegiatan	60,000,000	1	Kegiatan	60,000,000	
																									Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk				1	Kegiatan	30,000,000	
																									Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran				1	Kegiatan	30,000,000	
											Prosentase Fasilitasi Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 - 18 Tahun	100	%	324,322,200	100	%	324,322,200	Peningkatan Administrasi Catatan Sipil	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	2	Kegiatan	274,322,200	2	Kegiatan	274,322,200	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	2	Kegiatan	33,232,000	1	Kegiatan	23,322,200	**Pelayanan Pencatatan Sipil**
																									Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil				1	Kegiatan	10,000,000	
																		Dukungan Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	4	Kegiatan	50,000,000	4	Kegiatan	50,000,000	Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting				1	Kegiatan	10,000,000	
																									Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	4	Kegiatan	46,504,000	1	Kegiatan	21,000,000	
																									Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil				1	Kegiatan	10,000,000	

																		Penyelenggaraan Catatan Sipil di Kabupaten/Kota (DAK)	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1	Kegiatan		1	Kegiatan		Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil	1	Kegiatan	97,400,000	1	Kegiatan	47,400,000	**Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**
																			Peningkatan Kapasitas Aparatur Pencatatan Sipil	1	Kegiatan		1	Kegiatan		Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	1	Kegiatan	40,518,000	1	Kegiatan	40,518,000	
																			Peningkatan Pencatatan Target Nasional Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun Tingkat Kabupaten/Kota	1	Kegiatan		1	Kegiatan		Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	1	Kegiatan	46,072,000	1	Kegiatan	46,072,000	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi**
																			Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Catatan Sipil	1	Kegiatan		1	Kegiatan		Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	1	Kegiatan	66,010,000	1	Kegiatan	56,010,000	
																										Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil				1	Kegiatan	20,000,000	
																										Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil				1	Kegiatan	20,000,000	
																										Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				1	Kegiatan	20,000,000	
											Prosentase Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependuduka n Oleh SKPD	91.18	%	143,051,800	100	%	143,051,800	Pengelolaan SIAK Kabupaten/Kota (DAK)	Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Provinsi	1	Kegiatan		1	Kegiatan		Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	2	Kegiatan	33,200,000	2	Kegiatan	60,000,000	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi**
																			Peningkatan Koordinasi Penyusunan Profil Kependudukan Tingkat Provinsi	1	Kegiatan		1	Kegiatan		Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	Kegiatan	21,200,000	1	Kegiatan	60,060,000	
																			Penatausahaan Aset BMN Dukcapil	1	Kegiatan		1	Kegiatan		Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	1	Kegiatan	90,984,000	1	Kegiatan	90,984,000	
																			Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	2	Kegiatan		2	Kegiatan		Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	Kegiatan	24,874,000	1	Kegiatan	60,000,000	
																			Monitoring dan Evaluasi Pengelolan Data Kependudukan	2	Kegiatan		2	Kegiatan		Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi	1	Kegiatan	121,951,000	1	Kegiatan	121,951,000	
																										Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1	Kegiatan	154,556,800	
																										Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1	Kegiatan	110,945,000	1	Kegiatan	110,945,000	
																			Monitoring dan Evaluasi Pengelolan Data Kependudukan	2	Kegiatan		2	Kegiatan		Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1	Kegiatan	60,000,000	**Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**
																										Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota				1	Kegiatan	60,000,000	
																										Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	Kegiatan	26,379,000	1	Kegiatan	30,000,000	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi**

																												Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data	1	Kegiatan	32,850,000	1	Kegiatan	60,000,000	
																												Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi				1	Kegiatan	60,000,000	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi**
																	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	3	Kegiatan	143,051,800	3	Kegiatan	143,051,800	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan				1	Kegiatan	60,000,000	
																		Persentase Pengelolaan administrasi kependudukan berbasis SIAK versi	100	%	1,098,530,000	100	%	1,100,060,000		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	1	Kegiatan	250,000,000	1	Kegiatan	250,000,000	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan	1	Kegiatan	112,035,000	1	Kegiatan	121,975,000	**Penyediaan Profil Kependudukan**
																							Pengelolaan Database SIAK	2	Kegiatan	848,530,000	2	Kegiatan	850,060,000	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	2	Kegiatan	132,640,000	2	Kegiatan	132,640,000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH	MENINGKATKAN AKSES DAN PEMERATAAN PELAYANAN PENDIDIKAN BERKUALITAS	Terwujudnya peningkatan Kualitas Akses dan Pemerataan Pelayanan KB dan Pembangunan Keluarga	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Angka kelahiran total (total fertility rate / TFR)		2.23 nilai			Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang memanfaatkan dokumen kebijakan kependudukan	100	%	539,831,000	100	%	539,831,000	Pemetaan dan pengendalian kuantitas penduduk	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	2	dokumen	100,000,000	2	dokumen	100,000,000	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	2	Dokumen	97,857,000	2	Dokumen	153,233,000	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi**
																			Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	4	dokumen	389,831,000	4	dokumen	389,831,000	Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1	Dokumen	68,299,000	1	Dokumen	68,299,000	
																												Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga	1	Dokumen	15,265,000	1	Dokumen	50,000,000	
																												Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga				1	Dokumen	50,000,000	
																												Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat	1	Dokumen	15,265,000				**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**
																												Advokasi dan Sosialisasi GDPK				1	Dokumen	50,000,000	
																												Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	1	Dokumen	68,299,000	1	Dokumen	68,299,000	
																												Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK dan Sektor Lain				1	Dokumen	50,000,000	
																			Advokasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Non Formal Dan Informal Pada	1	dokumen	50,000,000	1	dokumen	50,000,000	Advokasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Non Formal Dan Informal Pada	1	Dokumen	16,465,000	1	Dokumen	50,000,000	
											Persentase Peserta KB Aktif	0.03	%	455,178,000	0.03	%	455,178,000	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan (AKIE) Keluarga Berencana (KB)	Pengembangan Program Kampung KB	2	Kegiatan	273,494,000	2	Kegiatan	273,494,000	Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program	1	Kegiatan	22,863,000	1	Kegiatan	79,044,000	**Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan**
																												Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra	1	Kegiatan	33,270,000	1	Kegiatan	33,517,000	
																												Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan				1	Kegiatan	115,000,000	

																			Pengembangan dan Penyediaan Materi Sarana Promosi, KIE Dalduk, KB & Pembangunan Keluarga	1	Kegiatan	100,000,000	1	Kegiatan	100,000,000	Pengembangan dan Penyediaan Materi Sarana Promosi, KIE Dalduk, KB & Pembangunan Keluarga	1	Kegiatan	34,524,000	1	Kegiatan	35,524,000	
																			Peningkatan Kualitas Pengelolaan Layanan Keluarga Berencana	4	Kegiatan	81,684,000	4	Kegiatan	81,684,000	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	4	Kegiatan	142,093,000	3	Kegiatan	142,093,000	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan**
																										Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK				1	Kegiatan	50,000,000	
											Peningkatan Persentase Kelompok Kegiatan Yang Melaksanakan 8 Fungsi	4.7	%	602,741,000	5.37	%	602,741,000	Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	Advokasi Remaja Tentang Generasi Berencana	32	kelompok	130,000,000	32	kelompok	130,000,000	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	24	Kelompok	119,612,000	24	Kelompok	119,611,000	**Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**
																			Peningkatan Kualitas Pengelolaan Layanan Keluarga Sejahtera	24	kelompok	199,241,000	24	kelompok	199,241,000	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	24	Kelompok	54,338,000	24	Kelompok	54,330,000	
																										Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja				40	Kelompok	80,300,000	
																										Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000				40	Kelompok	80,000,000	
																			Pembinaan Kelompok BKB, BKR dan BKL dan UPPKS	32	kelompok	273,500,000	32	kelompok	273,500,000	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	30	Kelompok	27,690,000	30	Kelompok	28,690,000	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**
																										Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	32	Kelompok	79,810,000	32	Kelompok	79,810,000	
																										Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga				40	Kelompok	80,000,000	
																										Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB				40	Kelompok	80,000,000	
														15,870,220,000			17,871,750,000					15,870,220,000			17,871,750,000				12,152,750,000			17,871,750,000	

KLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

endagri Nomor050-7308 tahun 2020 Tentang Hasil Verivikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Program	Indikator Program	Target Indikator Program	Target Indikator Program						Indikator Kinerja Sasaran OPD	Target Indikator Kinerja Sasaran OPD				Sasaran	Tujuan	Misi	Visi	Urusan
			2021			2022				2021		2022						
			Target	Satuan	Rp.	Target	Satuan	Rp.		Target	Satuan	Target	Satuan					
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Capaian kesesuaian dengan Parameter perilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	100%	100	%	499,000,000	100	%	600,000,000	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	85	%	85	%	Meningkatnya Penyelenggaraan DP3AKKB yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Terwujudnya kelembagaan DP3AKKB yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur	MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)	BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi	100%	100	%	2,233,661,000	100	%	6,907,980,000										

	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100	%	31,339,000	100	%	130,000,000											
	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang	100%	100	%	75,000,000	100	%	100,000,000											

PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Peningkatan Kontribusi Perempuan di Bidang Ekonomi	34.13 %	33.13	%	668,000,000	34.13	%	1,532,300,000	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71.94	Nilai	72.74	Nilai	Meningkatnya Pengarustamaan Gender	Terwujudnya PUG dan Perlindungan Perempuan dan Anak Menuju Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlakul Karimah dan Berdaya Saing	MENINGKATKAN AKSES DAN PEMERATAAN PELAYANAN PENDIDIKAN BERKUALITAS	BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen	16.47 %	16.47	%	1,893,750,000	17.64	%	476,826,000											
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Peningkatan Lembaga Pemerintah Tingkat Daerah Provinsi Yang Responsif Gender	100%	93.33	%	290,690,000	100	%	112,750,000											
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Peningkatan Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Perempuan	23.33 %	20	%	2,412,000,000	23.33	%	1,321,984,000											baru

Baru

																			baru
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Prosentase Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan	100%	100	%	1,090,650,500	100	%	1,561,110,000	Pemenuhan Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak	77.27	%	100	%	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Terwujudnya PUG dan Perlindungan Perempuan dan Anak Menuju Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlakul Karimah dan Berdaya Saing	MENINGKATKAN AKSES DAN PEMERATAAN PELAYANAN PENDIDIKAN BERKUALITAS	BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Prosentase Pengembangan Kab/Kota Menuju KLA Kategori Nindya	50%	37.5	%	344,109,500	50	%	797,990,000											

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Prosentase Peningkatan Sinergitas Program dan Kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak	37.5 %	37.5	%	344,110,000	37.5	%	600,000,000												

PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Prosentase Fasilitasi Dalam Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP-El di Kab/Kota	100%	87.5	%	437,996,000	100	%	565,626,000	Cakupan Database Kependudukan Tingkat Provinsi	100	%	100	%	Meningkatnya Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel	Terwujudnya kelembagaan DP3AKKB yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat	MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)	BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH	PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Prosentase Fasilitasi Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 - 18 Tahun	100%	100	%	329,736,000	100	%	324,322,200										

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Prosentase Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Oleh SKPD	100%	91.18	%	462,383,000	100	%	988,496,800	-											

PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan administrasi kependudukan berbasis SIAK versi terupdate	100%	100	%	244,675,000	100	%	254,615,000											
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang memanfaatkan dokumen kebijakan kependudukan	100%	100	%	281,450,000	100	%	539,831,000	Angka kelahiran total (total fertility rate / TFR)	2.23	angka	2.26	angka	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Terwujudnya peningkatan kualitas akses dan pemetaan pelayanan KB dan Pembangunan	MENINGKATKAN AKSES DAN PEMERATAAN PELAYANAN PENDIDIKAN BERKUALITAS	BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	baru
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Peserta KB Aktif	0.03 %	0.03	%	232,750,000	0.03	%	455,178,000											

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Peningkatan Persentase Kelompok Kegiatan Yang Melaksanakan 8 Fungsi Keluarga	5.37%	4.7	%	281,450,000	5.37	%	602,741,000										
					12,152,750,000			17,871,750,000										

Serang, Maret 2021
KEPALA DP3AKKB PROVINSI BANTEN

Dra. Hj. Sitti Ma`ani Nina, M.Si
NIP. 19681012 198803 2 003

BAB 3

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB 3 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA

Maksud penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten adalah :

a. Menjadi acuan pelaksanaan program kegiatan tahunan bagi bagian dan subbag Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten;
b. Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2022;
c. Menciptakan kepastian kebijakan, yang merupakan komitmen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten Tahun 2021 adalah:

a. Menjabarkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten Tahun 2017-2022 kedalam rencana Program kegiatan Prioritas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022;
b. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan diantara bagian dan subbag di lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten;

c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten.

3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan peningkatan dan pemantapan tata kelola pemerintahan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas pemberdayaan perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten Tahun 2017-2022 serta memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten melaksanakan program dan kegiatan prioritas tahun 2022 sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dilaksanakan melalui kegiatan :
   1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang difokuskan kepada :
      a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
      f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

   2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang difokuskan kepada :
      a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
      c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang difokuskan kepada :
   a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
   b. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah yang difokuskan kepada :
   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang difokuskan kepada Pengadaan Mebel

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang difokuskan kepada :
   a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang difokuskan kepada :
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

B. Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dilaksanakan melalui Kegiatan :

1. Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi yang difokuskan kepada :
   a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
   b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
   c. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi

2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi yang difokuskan kepada :
   a. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
   b. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi

3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang difokuskan kepada :
   a. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi

C. Program Perlindungan Perempuan dilaksanakan melalui Kegiatan :

1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang difokuskan kepada :
   a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi

2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang difokuskan kepada :
   a. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
   b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi

3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi yang difokuskan kepada :
   a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
   b. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

D. Program Peningkatan Kualitas Keluarga dilaksanakan melalui Kegiatan :
   1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi yang difokuskan kepada :
      a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota

b. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi

2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi yang di fokuskan kepada :
   a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
   b. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi

E. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dilaksanakan melalui kegiatan :
   1. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi, yang difokuskan kepada :
      a. Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi
      b. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi

F. Program Pemenuhan Hak Anak yang dialksanakan melalui kegiatan :
   1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi, yang difokuskan kepada :
      a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
      b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi
   2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi

a. Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

G. Program Perlindungan Khusus Anak yang dilaksanakan melalui kegiatan :
   1. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, yang difokuskan kepada :
      a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
      b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
   2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi, yang difokuskan kepada :
      a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
      b. Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
   3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah yang difokuskan kepada :
      a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

H. Program Pendaftaran Penduduk yang dilaksanakan melalui :
   1. Pelayanan Pendaftaran Kependudukan yang difokuskan kepada :
      a. Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi

2. Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
    a. Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk
    b. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk
3. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
    a. Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pendaftaran Penduduk
    b. Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk

I. Program Pencatatan Sipil yang dilaksanakan melalui kegiatan :
1. Pelayanan Pencatatan Sipil yang difokuskan kepada :
    a. Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi
    b. Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota
2. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi yang difokuskan kepada :
    a. Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil
    b. Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil
3. Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil yang difokuskan kepada :
    a. Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil
    b. Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil

J. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan melalui kegiatan :
1. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi yang difokuskan kepada :
    a. Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
    b. Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
    c. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
    d. Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi

e. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
f. Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi

2. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi yang difokuskan kepada :
   a. Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
   b. Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan

K. Program Pengelolaan Profil Kependudukan yang dilaksanakan melalui kegiatan :
   a. Penyediaan Data Kependudukan Provinsi
   b. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain

L. Program Pengendalian Penduduk yang dilaksanakan melalui kegiatan :
   1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk, yang difokuskan kepada :
      a. Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi
      b. Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat
      c. Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan
   2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi, yang difokuskan kepada :

a. Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
b. Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
c. Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga

M. Program Pembinaan Keluarga Berencana yang dilaksanakan melalui kegiatan:
   1. Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal dengan difokuskan kepada :
      a. Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal
      b. Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja
      c. Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK
   2. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB dengan difokuskan kepada :
      a. Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

N. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) yang dilaksanakan melalui kegiatan:
   1. Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang difokuskan kepada :

a. Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
b. Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencan

4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang difokuskan kepada :
   a. Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
   b. Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

BAB 4

PENUTUP

BAB 4 PENUTUP

Dengan adanya Rancangan Renja SKPD Tahun 2021, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas sebagai penjabaran Visi dan Misi Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten tahun 2017-2022, dapat lebih terkoordinasi, terintegerasi dan sinegris dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Selanjutnya diharapkan peran aktif seluruh bidang teknis sebagai unit satuan kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten dalam mendukung pencapaian target kinerja pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

MATRIK POHON KINERJA SAKIP 2020

SKPD : DINAS P3AKKB PROVINSI BANTEN

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN			PIC			PROGRAM	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM			PIC			KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN			PIC		
	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	NAMA	JABATAN	NIP			INDIKATOR	TARGET	SATUAN	NAMA	JABATAN	NIP		INDIKATOR (KELUARAN)	TARGET	SATUAN	NAMA	JABATAN	NIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Meningkatnya Penyelenggaraan DP3AKKB yang Akuntabel, Efektif,	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	80	%	Dra. Hj. Sitti Ma'ani Nina, M.Si	Kepala Dinas	19681012 198803 2 003	Tata Kelola Pemerintahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian Dok perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	100	%	Drs. Iwan Ardiansyah Sentono	Sekretaris Dinas	19740916 199311 1 003	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Tersusunnya Dokumen Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan (LPPD, LKPj, dan LKIP OPD)	3	dokumen	H. Achmad Izzudin, SE, M.Si	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan	19661218 200112 1 002
																Tersusunnya Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan (RENJA Tahun N dan N+1 (2 dok), RKAP dan DPPA Tahun N (2 dok), RKA dan DPA Tahun N+1 (2 dok), PERKIN dan IKU SKPD N dan N+1 (2 dok), Forum Renja (1 dok), Penyusunan RUP (2 dok))	11	dokumen			
																Tersusunnya Dokumen Laporan Evaluasi dan Pengendalian (Laporan Bulanan (8 dok), Triwulanan (2 dok), Semesteran (1 dok) dan Tahunan Kegiatan PD (1 dok))	12	dokumen			
																Tersusunnya Dokumen Data dan Informasi Pembangunan (Profil Kinerja OPD (2 dok), Visualisasi OPD (1 dok), Pengelolaan Website OPD (1 dok), Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik (2 dok), PPID(1 dok))	7	dokumen			
									Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	100	%				Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kanto	1	kegiatan	Inova Handayani, S.STP	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	19821022 200112 2 002
																Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor (Pemeliharaan APK, Pemeliharaan Kendaraan Dinas R2 dan R4, dan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor)	3	kegiatan			
																Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa (Operasional kantor Tidak Tetap, Penyediaan Barang Habis Pakai, Penyediaan Makan dan Minum Kantor, Penyediaan Operasional Jasa Kantor, Penyediaan BBM,	6	kegiatan			
																Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah (Rapat Koordinasi Kedalam Daerah, Rapat Koordinasi Keluar Daerah)	2	kegiatan			
									Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas	100	%				Peningkatan Kapasitas Aparatur	Tersusunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian (Kenaikan Pangkat dan Golongan PNS 1 Dok, Kenaikan Gaji Berkala PNS 1 Dok, Pemutahiran Data Kepegawaian dan Kompetensi Pegawai 1 Dok, Evaluasi SKP 12 Dok)	15	dokumen			
																Tersusunnya Dokumen Peningkatan Kompetensi Aparatur (Fasilitasi Kursus 1 Dok, Pelatihan 1 Dok, dan Bimtek 1 Dok)	3	dokumen			
															Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD DP3AKKB Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Khusus SKPD DP3AKKB	1 1	kegiatan kegiatan			
									Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas	100	%				Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran (1 Dok), Laporan SPIP (1 Dok), Penyusunan Laporan Keuangan Semester I (1 dok), Penyusunan Laporan Realisasi Semester dan Prognosis 6 bulan (1 Dok), Penyusunan Dokumen SPP,	8	dokumen	Dra. Hj. Maemunah, M.Si	Kepala Sub Bagian Keuangan	19651019 198703 2 001
																Tersusunnya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)(TLHP Semester I dan II)	2	dokumen			
																Tersusunnya Dokumen Laporan Pajak (Pajak PPh Pasal 21 PD Prov. Banten TA. 2020 (1 Dok), Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 Kegiatan SKPD PD Prov. Banten TA. 2020 (1 Dok), Pelaporan SPT Pajak Tahunan PD Provinsi Banten	3	dokumen			

Meningkatnya Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel	Cakupan Database Kependudukan Tingkat Provinsi	100	%				Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Meningkatnya adiministrasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota	Prosentase Fasilitasi Dalam Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP-El di Kab/Kota	75	%	Hj. Nurhayati Nufus, SE, MM, M.Si	Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19690820 200112 2 001	Peningkatan Penyelenggaraan KTP-El dan KIA	Terlaksanannya Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan KTP-El dan KIA Kab/Kota (Rakor Triwulan 1dan Rakor Triwulan 4)	2	kegiatan	Saifulloh, S.Sos, M.Si	Kepala Seksi Pembinaan Kependudukan	19740225 200112 1 002
																Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Provinsi Banten (Monev Adminduk)	1	kegiatan			
																Terlaksananya Penataan Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi (Sosialisasi Kebijakan Adminduk dan Dukungan Perekaman KTP-el dan KIA)	2	kegiatan			
															Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota (DAK)	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Adminduk Kabupaten/Kota (Monev Adminduk)	1	kegiatan			
																Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Peyelenggaraan Pelayanan Adminduk (Koordinasi Adminduk dan Konsultasi Adminduk)	2	kegiatan			
									Prosentase Fasilitasi Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 - 18 Tahun	87.5	%				Peningkatan Administrasi Catatan Sipil	Terlaksananya Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi (Bintek Tata Cara dan persyaratan penerbitan Akta Kelahiran, Monev)	2	kegiatan	Tb. Uda Nurul Huda, S.IP, M.Si	Kepala Seksi Pembinaan Pencatatan Sipil	19801112 200212 1 001
																Terlaksananya Dukungan Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil Di Kabupaten/Kota (Penerbitan Akta Kelahiran Triwulanan)	4	kegiatan			
															Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil di Kabupaten/Kota (DAK)	Terlaksananya Peningkatan Pencatatan Target Nasional Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun Tingkat Kabupaten/Kota (Rakor Akta Kelahiran Anak Usia 0 -18 Tahun)	1	kegiatan			
																Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pencatatan Sipil (Bintek Tatacara dan Persyaratan Akta Perceraian dan Kematian)	1	kegiatan			
									Prosentase Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Oleh SKPD Provinsi	50	%				Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependuduka (Pemanfaatan Data Agregat Kependudukan Semester 1 dan 2 (2 Kegiatan) dan Rakorbid Bidang Adminduk (1 Kegiatan)	3	kegiatan	Yulia Rehan Faradisa, S.Pd.Ing, M.Si	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	19740717 200112 2 007
									Persentase Pengelolaan administrasi kependudukan berbasis SIAK versi terupdate	100	%					Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Database SIAK (BImtek Pengelolaan SIAK (1 Kegiatan) dan Bimtek Pemanfaatan data kependudukan (1 Kegiatan)	2	kegiatan			
																Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain (Penyusunan Profil data Perkembangan data Kependudukan (1 Kegiatan)	1	kegiatan			
															Pembinaan Pengelolaan SIAK Kabupaten/Kota (DAK)	Terlaksananya Kegiatan Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Provinsi (Rakor Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Provinsi)	1	kegiatan			
																Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data (Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Adminduk BIdang PIAK dan Pemanfaatan Data)	2	kegiatan			
																Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Data Kependudukan (Monev Pengelolaan Data Kependudukan Semester 1 dan 2)	2	kegiatan			
																Terlaksananya Kegiatan Penatausahaan Aset BMN Dukcapil (Penatausahaan Aset BMN Dukcapil)	1	kegiatan			
Meningkatnya Pengarustamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71.14	Nilai				Program Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya peran dan kemandirian perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender	Persentase Peningkatan Lembaga Pemerintah Tingkat Daerah Provinsi Yang Responsif Gender	82.22	%	Dra. Evi Sofia Restu Nilawati	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga	19661026 199202 2 002	Perencanaan Responsif Gender	Terlaksananya Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi (Penyusunan Profil Gender dan Anak, Bimtek Pengelola Data Gender dan Anak)	2	kegiatan	Sri Haryati, S.Ag	Kepala Seksi Pengarustamaan Gender	19740918 200112 2 002
																Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) (Bimtek Penyusunan Dokumen PPRG dan Evaluasi Dokumen PPRG)	2	kegiatan			
																Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tingkat Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota (Evaluasi PUG dan Rakorbid Pemberdayaan Perempuan)	2	kegiatan			
																Terlaksananya Koordinasi Jejaring Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Tingkat Provinsi Banten (Rakor Jejaring PUG)	1	kegiatan			
									Persentase Peningkatan Kontribusi Perempuan di Bidang Ekonomi	32.13	%				Peningkatan kualitas hidup perempuan	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Perempuan pada bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi (Sosialisasi Partisipasi Perempuan Bidang Politik (2 Kegiatan) dan Dukungan Peningkatan Kelembagaan Perempuan Bidang Ekonomi)	3	kegiatan	Drs. Almahdi	Kepala Seksi Kualitas Hidup Perempuan	19660504 199312 1 003
									Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen	15.29	%					Terlaksananya Peningkatan Koordinasi dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Bagi SKPD se-Provinsi Banten (Rakor dan Evaluasi PKHP dan Rapat Koordinasi PPEP)	2	kegiatan			

																Terlaksananya peningkatan Pengelolaan Industri Rumahan Perempuan (Blmtek Pengelolaan IR Perempuan (3 Kegiatan) , Pameran Hasil Industri Rumahan Perempuan dan Monitoring Evaluasi Perempuan)	5	kegiatan			
									Persentase Peningkatan Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Perempuan	16.67	%				Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga	Terlaksananya Pengembangan kegiatan masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga kewenangan Provinsi (Penilaian Pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu (GSI) Tk. Provinsi Banten, Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS), Pembinaan Pola A	3	dokumen	Dra. Enok Djubaedah, MM	Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga	19620831 199203 2 001
																Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi (Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), BKOW Provinsi Banten, DWP Provinsi Banten)	3	dokumen			
																Terlaksananya Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Provinsi Banten dan Kab/Kota (Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Provinsi, Pengukuran Indeks Ketahanan Keluarga (IKK))	3	dokumen			
Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Pemenuhan Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak	72.73	%				Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Prosentase Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan	100	%	Ir. Hj. Erminiwati, M.Si	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	19701212 199603 2 008	Perlindungan Hak Perempuan	Terlaksananya Penguatan jejaring Antar lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Prov & Lintas Kab/Kota (Rakor Jejaring Perlindungan Perempuan (1 keg); dan Pengelolaan Sistem Informasi Perlindungan Perempuan (1 keg))	2	kegiatan	Nenok Sriwati Mekar Arum, S.Sn.	Kepala Seksi Perlindungan Perempuan	19681129 199303 2 006
																Terlaksananya Peningkatan peran Lembaga/Ormas/Dunia Usaha dan Media Dalam Perlindungan Perempuan (Rakor Forum Partisipasi Publik (Puspa)(1 keg) dan Peningkatan Layanan P2TP2A (1 keg))	2	kegiatan			
																Terlaksananya Peningkatan Koordinasi Tugas Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-P2TPPO)(Rakor GT TPPO (1 keg) Pembentukan Komunitas P2TPPO (1 keg) dan Penyuluhan Pencegahan KDRT (1 keg))	3	kegiatan			
																Terlaksananya Peningkatan Koordinasi Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan Tingkat Provinsi (Rakor Forum Penanganan Korban Kekerasan (1 keg); dan Rapat Koordinasi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (1 keg))	2	kegiatan			
									Prosentase Peningkatan Sinergitas Program dan Kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak	25	%				Perlindungan khusus terhadap anak	Terlaksananya Evaluasi Perlindungan Khusus Anak (Semester 1 dan Semster II)	2	kegiatan	Ir. Hj Sri Murtiningsih, MM	Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak	19631221 198903 2 004
																Terlaksananya Peningkatan penyelenggaraan Perlindungan Anak (Rakor Perlindungan Khusus Anak (4 keg),Rakor PATBM (1 keg) dan Update Data Perlindungan Khusus Anak (1 keg))	6	kegiatan			
																Terlaksananya Penyusunan RAD Pencegahan dan Penanganan Pornografi Bagi Anak (1 Kegiatan)	1	kegiatan			
																Terlaksananya Pengembangan KIE Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi (1 Kegiatan)	1	kegiatan			
									Prosentase Pengembangan Kab/Kota Menuju KLA Kategori Nindya	25	%				Perlindungan dan peningkatan tumbuh kembang anak	Terlaksananya Peningkatan Koordinasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tingkat Provinsi Banten (Rakor KLA tingkat provinsi banten (2 keg) dan Pembinaan Forum Anak (3 Keg))	5	kegiatan	Siti Ulfah Fatimah, S.Ag, M.Si	Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak	19710714 200112 2 005
Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Angka kelahiran total (total fertility rate / TFR)	2.21	Angka				Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Meningkatnya pemahaman kependudukan dan Peningkatan Layanan KB serta Pembangunan Keluarga	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang memanfaatkan dokumen kebijakan kependudukan	100	%	Drs. Rikrik Hermawan	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	19650419 199102 1 001	Pemetaan dan pengendalian kuantitas penduduk	Tersusunnya Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	4	dokumen	H. Ahmad Suheri, S.Pd, M.Si	Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Pelayanan KB	19730303 200003 1 007
																Tersusunnya Advokasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Non Formal dan Informal pada Ormas Kelompok Masyarakat	1	dokumen			
																Tersusunnya Profil Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	2	dokumen			
									Persentase Peserta KB Aktif	0.02	%				Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan (AKIE) Keluarga Berencana (KB)	Terlaksananya Pengembangan Program Kampung KB (Bintek Pokja Kampung KB, Monev Pengembangan Kampung KB)	2	kegiatan	Epa Perawati, SH, M.Si	Kepala Seksi Advokasi Komunikasi Informasi, Edukasi dan Pembinaan Layanan KB	19700224 200112 2 001
																Terlaksananya Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi,Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk KB dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearipan Budaya Lokal (Pembuatan Materi Promosi KKBPK)	1	kegiatan			

																Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pengelolaan Layanan Keluarga Berencana (Penjaringan Pelayanan KB, Bintek Pengelolaan Layanan Keluarga Berencana, Peningkatan Kemitraan Layanan Keluarga Berencana, Desiminasi Program Kesehatan Reproduksi)	4	kegiatan			
										Peningkatan Persentase Kelompok Kegiatan Yang Melaksanakan 8 Fungsi Keluarga	4.03	%				Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	Terlaksananya Peningkatan kualitas Pengelola layanan Keluarga Sejahtera (Bimtek PPKS 8 Kelompok),Bimtek PPKBD 8 Kelompok) dan Rakor Keluarga Sejahtera (8 Kelompok)	24	kelompok	Endang Purwataningsih, S.Pd, M.Pd	Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Pelayanan KB	19691130 200003 2 002
																Terlaksananya Pembinaan Bina Keluarga Balita (BKB) ,Bina Keluarga Remaja (BKR) ,Bina Keluarga Lansia (BKL) dan UPPKS (Bimtek BKB 8 kelompok, Bimtek BKR 8 Kelompok, Bimtek BKL 8 kelompok dan Bimtek UPPKS 8 kelompok)	32	kelompok			
																terlaksananya Advokasi Remaja Tentang Generasi Berencana (Sosialisasi Gendre bagi Pelajar 8 Kelompok dan Diseminasi Kehidupan Berkeluarga bagi Mahasiswa 24 kelompok)	32	kelompok			

Serang, November 2019
KEPALA DP3AKKB PROVINSI BANTEN

Dra. Hj. Sitti Ma`ani Nina, M.Si
NIP. 19681012 198803 2 003

Sandingan Pohon Kinerja Target RPJMD/Rensta OPD/RKPD/Renja OPD Tahun 2022

OPD : DP3AKKB PROVINSI BANTEN

Sebelum Pemetaan dan Pemutahiran Permendagri Nomor 90 Tahun 2019												Setelah Pemetaan dan Pemutahiran Permendagri Nomor 90 Tahun 2019										
Urusan	**Prioritas Nasional**	**Prioritas Provinsi**	**Sasaran Tahunan OPD**	**Indikator Kinerja Sasaran OPD**	**Target Indikator Kinerja Sasaran OPD**	**Program**	**Indikator Program**	**Target Indikator Program**	**Kegiatan**	**Sub Kegiatan**	**Target Indikator Kinerja Sub Kegiatan**	**Sub Kegiatan**	**Target Indikator Kinerja Sub Kegiatan**	**Kegiatan**	**Program**	**Indikator Program**	**Target Indikator Program**	**Sasaran Tahunan OPD**	**Indikator Kinerja Sasaran OPD**	**Target Indikator Kinerja Sasaran OPD**	**Prioritas Provinsi**	**Prioritas Nasional**	**Urusan**
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Melalui Pemantapan 8 Area Perubahan	Meningkatnya Penyelenggaraan DP3AKKB yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	85 Nilai	Program Tata Kelola Pemerintahan	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	100%	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Penyusunan Laporan Evaluasi Program Kegiatan	3 dokumen	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	100%	Meningkatnya Penyelenggaraan DP3AKKB yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	85 Nilai	Reformasi Birokrasi Melalui Pemantapan 8 Area Perubahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
										Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan	11 dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen										
										Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	7 dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen										
												Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen										
												Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen										
												Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen										
										Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian	4 dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen										
							Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat	100%	Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	6 kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1 Kegiatan	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan	100%						
												Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Kegiatan										
												Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Kegiatan										
												Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Kegiatan										
												Penyediaan Bahan/ Material	1 Kegiatan										
												Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Kegiatan										
												Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Kegiatan	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**									
												Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Kegiatan										
										Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1 kegiatan	Pengadaan Mebeler	1 Kegiatan	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**									

			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	2 kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Kegiatan	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Kegiatan					
					Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1 Kegiatan					
			Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah	2 kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan	100%	
		Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	Pengelolaan Kearsipan Dinamis	12 bulan							
			Pengelolaan Perpustakaan Khusus	12 bulan					Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang	100%	
Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan	100%	Peningkatan Kapasitas Aparatur	Fasilitasi Administrasi Kepegawaian	4 dokumen	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Kegiatan	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				
			Peningkatan Kompetensi Aparatur	1 kegiatan	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Kegiatan					
Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan	8 dokumen	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan					
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen					
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen					
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3 Dokumen					
					Koordinasi dan Pelaksana Akuntansi SKPD	1 Dokumen					
			Penyusunan Dok Laporan Pajak	3 dokumen	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen					

										Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)	2 dokumen	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 Dokumen										
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Melalui Pembangunan Akses & Mutu Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Life Skill	Meningkatnya Pengarustamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71.94 Nilai	Program Pemberdayaan Perempuan	Persentase Peningkatan Kontribusi Perempuan di Bidang Ekonomi	33.13 %	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Peningkatan Pengelolaan Industri Rumahan Perempuan	3 Kegiatan	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	2 Kegiatan	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Persentase Peningkatan Kontribusi Perempuan di Bidang Ekonomi	33.13 %	Meningkatnya Pengarustamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71.94 Nilai	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Melalui Pembangunan Akses & Mutu Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Life Skill	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
							Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen	16.47 %		Peningkatan Koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan PKHP Bagi SKPD se-Prov. Banten	2 Kegiatan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan	5 Kegiatan	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik. Hukum. Sosial. dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi**		Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen	16.47 %						
										Peningkatan Parsitisipasi Perempuan pada bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan provinsi	3 Kegiatan	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	3 Kegiatan									
							Persentase Peningkatan Lembaga Pemerintah Tingkat Daerah Provinsi Yang Responsif Gender	93.33 %	Perencanaan Responsif Gender	Pelatihan Penyusunan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)	2 Kegiatan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	2 Kegiatan	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi**							
										Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tingkat Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	1 Kegiatan									
										Peningkatan Jejaring Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Tingkat Provinsi Banten	1 Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	2 Kegiatan									
										Penyusunan data gender dan anak provinsi	2 Kegiatan	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	1 Kegiatan	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	Persentase Peningkatan Lembaga Pemerintah Tingkat Daerah Provinsi Yang Responsif Gender	93.33 %						
												Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	1 Kegiatan									
							Persentase Peningkatan Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Perempuan	20%	Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga	Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan provinsi	3 Kegiatan	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan	1 Kegiatan	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	Persentase Peningkatan Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Perempuan	20%						

										Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Keluarga tingkat provinsi banten dan Kab Kota	3 Kegiatan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan	1 Kegiatan	**Provinsi**									
										Peningkatan kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas keluarga	3 Kegiatan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	3 Kegiatan										
												Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	1 Kegiatan										
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Melalui Pembangunan Akses & Mutu Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Pemenuhan Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak	77.27 %	Perlindungan Perempuan dan Anak	Prosentase Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan	100%	Perlindungan Hak Perempuan	Peningkatan Koordinasi Tugas Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-P2TPPO)	3 Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan	4 Kegiatan	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Prosentase Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan	100%	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Pemenuhan Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak	77.27 %	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Melalui Pembangunan Akses & Mutu Pelayanan Kesehatan, Pendidikan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
										Peningkatan peran lembaga/ organiasi kemasyarakatan / dunia usaha dan media dalam Perlindungan Perempuan	2 Kegiatan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	1 Kegiatan	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan**									
										Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan										
										Peningkatan Koordinasi Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan Tingkat Provinsi	2 Kegiatan	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**									
												Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	1 Kegiatan										

							Prosentase Pengembangan Kab/Kota Menuju KLA Kategori Nindya	37.5 %	Perlindungan dan peningkatan tumbuh kembang anak	Peningkatan Koordinasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tingkat Provinsi Banten	5 Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	4 Kegiatan	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	Prosentase Peningkatan Sinergitas Program dan Kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak	37.5 %							
										Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	1 Kegiatan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	1 Kegiatan										
										Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten /Kota	2 Kegiatan	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten /Kota	2 Kegiatan	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi**									
							Prosentase Peningkatan Sinergitas Program dan Kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak	37.5 %	Perlindungan khusus terhadap anak	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan	2 Kegiatan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan	1 Kegiatan	**Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Prosentase Peningkatan Sinergitas Program dan Kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak	37.5 %							
										Evaluasi Perlindungan Khusus Anak Tingkat Provinsi Banten	2 Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	2 Kegiatan										
										Pengembangan KIE Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 Kegiatan	Pengembangan KIE Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 Kegiatan	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi**									
										Peningkatan penyelenggaraan Perlindungan Anak	6 Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 Kegiatan										
												Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	3 Kegiatan	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah**									

PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Melalui Pemantapan 8 Area Perubahan	Meningkatnya Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel	Cakupan Database Kependudukan Tingkat Provinsi	100%	Program Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Prosentase Fasilitasi Dalam Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP-El di Kab/Kota	87.5 %	Peningkatan Penyelenggaraan KTP-El dan KIA	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Provinsi Banten	1 Kegiatan	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	2 Kegiatan	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Prosentase Fasilitasi Dalam Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP-El di Kab/Kota	87.5 %	Meningkatnya Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel	Cakupan Database Kependudukan Tingkat Provinsi	100%	Reformasi Birokrasi Melalui Pemantapan 8 Area Perubahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
										Peningkatan Penyelenggaraan KTP-El dan KIA Kab/Kota	2 Kegiatan										
										Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	2 Kegiatan	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	2 Kegiatan	**Pelayanan Pendaftaran Kependudukan**							
									Penyelenggaraan Adminduk di Kabupaten/Kota (DAK)	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Adminduk Kabupaten/Kota	1 Kegiatan										
										Rapat koordinasi Pelaksanaan Penerbitan KTP-el di Kabupaten/Kota	1 Kegiatan										
										Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk	2 Kegiatan	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	1 Kegiatan	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran**							
										Peningkatan Penyelenggaran adminduk Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	1 Kegiatan	**Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan**							
										Koordinasi dan Konsultasi Peyelenggaraan Pelayanan Adminduk	1 Kegiatan	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Kegiatan								
							Prosentase Fasilitasi Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 - 18 Tahun	100%	Peningkatan Administrasi Catatan Sipil	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	2 Kegiatan	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	2 Kegiatan	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Prosentase Fasilitasi Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 - 18 Tahun	100%					
										Dukungan Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	4 Kegiatan	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	4 Kegiatan								
									Penyelenggaraan Catatan Sipil di Kabupaten/Kota (DAK)	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1 Kegiatan	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil	1 Kegiatan	**Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**							
										Peningkatan Kapasitas Aparatur Pencatatan Sipil	1 Kegiatan	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	1 Kegiatan								
										Peningkatan Pencatatan Target Nasional Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun Tingkat Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	1 Kegiatan	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi**							
										Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Catatan Sipil	1 Kegiatan	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	1 Kegiatan								

							Prosentase Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Oleh SKPD	91.18%	Pengelolaan SIAK Kabupaten/Kota (DAK)	Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Provinsi	1 Kegiatan	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	2 Kegiatan	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Prosentase Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Oleh SKPD	91.18%							
										Peningkatan Koordinasi Penyusunan Profil Kependudukan Tingkat Provinsi	1 Kegiatan	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Kegiatan												
										Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	2 Kegiatan	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Kegiatan												
												Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi	1 Kegiatan												
										Penatausahaan Aset BMN Dukcapil	1 Kegiatan	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Kegiatan												
										Monitoring dan Evaluasi Pengelolan Data Kependudukan	2 Kegiatan	Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Kegiatan	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi**											
												Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Kegiatan												
									Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	3 Kegiatan	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1 Kegiatan	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi**											
							Persentase Pengelolaan administrasi kependudukan berbasis SIAK versi terupdate	100%		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	1 Kegiatan	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	1 Kegiatan	**Penyediaan Profil Kependudukan**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	Persentase Pengelolaan administrasi kependudukan berbasis SIAK versi terupdate	100%							
										Pengelolaan Database SIAK	2 Kegiatan	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	2 Kegiatan												
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Melalui Pembangunan Akses & Mutu Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Life Skill	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Angka kelahiran total (total fertility rate / TFR)	2.23 nilai	Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang memanfaatkan dokumen kebijakan kependudukan	100%	Pemetaan dan pengendalian kuantitas penduduk	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	2 Dokumen	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	2 Dokumen	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang memanfaatkan dokumen kebijakan kependudukan	100%	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Angka kelahiran total (total fertility rate / TFR)	2.23 nilai	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Melalui Pembangunan Akses & Mutu Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Life Skill	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
										Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	4 Dokumen	Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen												

													Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga	1 Dokumen									
													Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	1 Dokumen	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**								
													Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	1 Dokumen									
											Advokasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Non Formal Dan Informal Pada	1 Dokumen	Advokasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Non Formal Dan Informal Pada	1 Dokumen									
								Persentase Peserta KB Aktif	0.03 %	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan (AKIE) Keluarga Berencana (KB)	Pengembangan Program Kampung KB	2 Kegiatan	Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE	1 Kegiatan	**Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	Persentase Peserta KB Aktif	0.03 %						
													Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	1 Kegiatan									
											Pengembangan dan Penyediaan Materi Sarana Promosi, KIE Dalduk, KB & Pembangunan Keluarga	1 Kegiatan	Pengembangan dan Penyediaan Materi Sarana Promosi, KIE Dalduk, KB & Pembangunan Keluarga	1 Kegiatan									
											Peningkatan Kualitas Pengelolaan Layanan Keluarga Berencana	4 Kegiatan	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	4 Kegiatan	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**									
								Peningkatan Persentase Kelompok Kegiatan Yang Melaksanakan 8	4.47%	Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	Advokasi Remaja Tentang Generasi Berencana	24 Kelompok	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	24 Kelompok	**Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	Peningkatan Persentase Kelompok Kegiatan Yang Melaksanakan	4.47%						
											Peningkatan Kualitas Pengelolaan Layanan Keluarga Sejahtera	32 Kelompok	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	24 Kelompok									

										Pembinaan Kelompok BKB, BKR dan BKL dan UPPKS	32 Kelompok	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	30 Kelompok	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**								
												Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	32 Kelompok								

Serang, November 2020
KEPALA DP3AKKB PROVINSI BANTEN

Dra. Hj. Sitti Ma`ani Nina, M.Si
NIP. 19681012 198803 2 003